

# **PERAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR PADA MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949- 1950)**



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

Rizky Fadhillah

1403619040

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

**RIZKY FADHILLAH.** Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950). *Skripsi*. Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran politik Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda dengan beragam strateginya ingin menguasai Indonesia kembali. Salah satu strategi yang digunakan Belanda ialah pembentukan negara-negara bagian yang dimulai melalui Perjanjian Malino pada tahun 1946. Pembentukan negara-negara bagian ini mengalami beragam kemajuan hingga mencapai puncaknya pada saat Konferensi Meja Bundar yang berhasil menjadikan Indonesia negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, terjadi pergolakan di daerah-daerah menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan. Mohammad Natsir dengan kejeliannya membaca situasi dan kondisi saat itu kemudian mengajukan suatu mosi yang akhirnya mosi ini dijadikan landasan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mengatasi problematika yang terjadi saat itu.

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif naratif. Pada penelitian ini penulis juga menjelaskan bagaimana strategi Mohammad Natsir agar mosi yang diajukannya dapat diterima setiap fraksi dalam parlemen RIS. Untuk meyakinkan setiap fraksi dalam parlemen RIS tersebut, Mohammad Natsir melakukan kunjungan ke setiap negara-negara bagian, selain itu Natsir juga melakukan pertemuan dengan setiap pemimpin fraksi yang ada di parlemen RIS, Natsir juga menjelaskan permasalahan yang utama bukanlah perihal unitarisme dan federalisme, sehingga perlu melepaskan pembicaraan pada hal-hal yang berkaitan dengannya, Natsir juga menekankan pemerintah haruslah mengambil penyelesaian secara integral untuk mengatasi permasalahan saat itu. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sikap dari setiap fraksi yang ada di parlemen RIS terhadap pembentukan negara kesatuan, dari jawaban yang diberikan oleh fraksi-fraksi tersebut, semua fraksi sepakat tentang pembentukan negara kesatuan yang merupakan hasil dari Mosi Integral Natsir. Selain itu, semua fraksi menganggap bahwa pembentukan negara kesatuan merupakan kehendak seluruh rakyat dan harus dilaksanakan segera.

Kata Kunci: Mohammad Natsir, Mosi Integral, Republik Indonesia Serikat

## ABSTRACT

**RIZKY FADHILLAH.** The Political Role of Mohammad Natsir during the United Republic of Indonesia (1949-1950). Thesis. Jakarta. Department of History Education. Faculty of Social Sciences. State University of Jakarta, 2024.

This research aims to explain the political role of Mohammad Natsir during the United Republic of Indonesia in 1949-1950. When Indonesia proclaimed its independence on 17 August 1945, the Dutch with various strategies wanted to regain control of Indonesia. One of the strategies used by the Dutch was the formation of states which began with the Malino Agreement in 1946. The formation of these states experienced various progresses until it reached its peak at the Round Table Conference which succeeded in making Indonesia a federal state under the name of the Republic of the United States of Indonesia. After the formation of the Republic of Indonesia, there were upheavals in the regions demanding a return to the unitary state. Mohammad Natsir with his foresight in reading the situation and conditions at that time then proposed a motion which was finally used as a basis by the government of the Republic of Indonesia to overcome the problems that occurred at that time.

This research uses a historical method with a descriptive narrative approach. In this study, the author also explains how Mohammad Natsir's strategy was to make his motion acceptable to every faction in the RIS parliament. To convince each faction in the RIS parliament, Mohammad Natsir made visits to each state, besides that Natsir also held meetings with each faction leader in the RIS parliament, Natsir also explained that the main problem was not about unitarism and federalism, so it was necessary to let go of discussions on matters related to it, Natsir also emphasised that the government must take an integral solution to overcome the problems at that time. This research also explains the attitude of each faction in the RIS parliament towards the formation of a unitary state, from the answers given by the factions, all factions agreed on the formation of a unitary state which was the result of Natsir's Integral Motion. In addition, all factions considered that the formation of a unitary state was the will of the entire people and must be implemented immediately.

Keywords: Mohammad Natsir, Integral Motion, United Republic of Indonesia

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta



## TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nurzengky Ibrahim, MM. NIP. 196110051987031005 Ketua Penguji		19/7/2024
2.	M. Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum. NIP. 197601302005011001 Sekretaris Penguji		19/7/2024
3.	Dr. M. Fakhruddin, M.Si NIP. 196505081990031005 Pembimbing I		19/7/2024
4.	Dr. Kurniawati M.Si NIP. 197708202005012002 Pembimbing II		19/7/2024
5.	Dr. Nur'aeni Marta, S.S. M.Hum NIP. 197109222001122001 Penguji Ahli		19/7/2024

Tanggal Lulus: 4 Juli 2024

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Fadhillah

No. Registrasi : 1403619040

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)”** dengan adanya lembar orisinalitas ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang dibuat oleh diri saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi referensi dalam penelitian ini telah saya cantumkan dan nyatakan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 15 Juli 2024



Rizky Fadhillah

*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telepon/Faksimili: 021-4894221  
Laman: [lib.unj.ac.id](http://lib.unj.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Fadhillah

NIM : 1403619040

Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah

Alamat email : rizkyfadhillah84@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul: **Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Juli 2024

Penulis

(Rizky Fadhillah)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak.”*

*“Pemimpin tidak bisa dicetak. Ia tidak timbul dengan sekadar diberi pelajaran. Ia tidak bisa diangkat dengan surat keputusan dari atasan. Pemimpin mekar dalam tekanan pikulan tanggung jawab. Pribadi kepemimpinan tumbuh dalam tantangan dan ujian di tengah masyarakat. Pemimpin tidak gembar-gembor, namun tidak diam. Ia tampil dengan ilmu, daya pikir, daya cepat, iman, dan akhlak mulia.”*

*Mohammad Natsir*

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan.”*

*Sutan Sjahrir*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yang telah memberikan cinta kasihnya selama ini kepada anaknya ini. Khususnya kepada ibu saya, ketahuilah saya sangat bangga lahir dari rahimmu ibu! Kepada kakek saya, yang memberikan dukungan dalam diam, tenang dan berbahagialah dalam keharibaannya. Serta kepada orang-orang yang telah berani bertaruh memberikan cinta kasih dan kepercayaannya kepada saya. Saya persembahkan ini untuk kalian.*

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di program Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, motivasi, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus Wadji, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ibu Dr. Nur’aeni Marta, S.S., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sekaligus sebagai penguji ahli pada saat sidang skripsi penulis. Bapak Dr. Nurzengky Ibrahim, MM selaku ketua penguji pada saat sidang skripsi penulis. Bapak M. Hasmi Yanuardi, S.S., M. Hum selaku sekretaris penguji pada saat siding skripsi penulis sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta.

Bapak Dr. M. Fakhrudin, M.Si. selaku pembimbing I penulis yang telah mencurahkan waktu serta pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dengan penuh perhatian. Tidak lupa juga saran, masukan dan pelajaran yang penulis dapatkan selama dibimbing oleh bapak. Ibu Dr. Kurniawati, M.Si. selaku pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu



serta pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Penulis banyak belajar dari ibu bagaimana menghargai sebuah proses serta hasil dari proses itu sendiri. Terima kasih juga atas masukan, saran serta motivasi yang penulis dapatkan selama dibimbing oleh ibu. Seluruh dosen program Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang selama penulis menjadi mahasiswa telah memberikan perhatian, pelajaran, dan kepercayaan yang sangat amat berarti bagi penulis. Penulis tidak akan melupakan jasa-jasa tersebut selama hidup penulis.

Ustadz Amlir Syaifa Yasin selaku narasumber dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ustadz atas ketersediaan waktu dan perspektif yang berharga untuk penelitian penulis, khususnya mengenai bagaimana kepribadian Mohammad Natsir. Buya Zulfi Syukur selaku narasumber dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Buya atas ketersediaan waktu, perspektif, serta dukungan moral Buya agar penulis sesegera mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini. Seluruh staff dan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, khususnya kepada Ustadz Adian Husaini dan Ustadz Kadir yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari sumber-sumber di Dewan Dakwah mengenai pak Natsir baik sumber tertulis maupun lisan.

Guru-guru penulis di masa sekolah, khususnya Ibu Indriati Sudiani S.Pd yang telah memberikan penulis motivasi, saran dan masukan berharga bagi penulis. Tak lupa juga kepercayaan beliau kepada penulis, terima kasih ibu atas segala yang ibu berikan. Kedua orang tua penulis, khususnya ibu penulis. Penulis bersyukur atas keharibaan kasih cinta, sayang, kepercayaan, dan banyak hal lainnya yang ibu

berikan. Kakek yang memberikan pelajaran berharga bagi penulis, yang diam-diam selalu mendoakan penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan kuliah ini, terlebih saat penyusunan penelitian skripsi ini. Teman-teman penulis yang selalu sedia membantu, memotivasi, dan memberikan masukan-masukan kepada penulis, khususnya Bang Maulana Malik Ibrahim, Irma Kamariati, Surayya, Yusi Rida, Tsania Lutfi, Elsa Maria, Arvin Rumbiak, dan Figo Handika. Elydea Nurelis yang selalu mau menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini bahkan sebelum itu. Terima kasih atas keluangan waktu, motivasi, dan tempat bercerita penulis, semoga hal-hal baik selalu menyertai dikau.

Jakarta, 4 Juni 2024

Rizky Fadhillah



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Metode dan Bahan Sumber .....	16
E. Sistematika Penelitian .....	18
F. Jadwal Penelitian .....	19
BAB II PERAN POLITIK NATSIR PADA MASA RIS .....	20
A. Biografi Mohammad Natsir .....	20
B. Proses Terbentuknya Republik Indonesia Serikat .....	32
C. Peran Politik Natsir Pada Masa RIS .....	69
BAB III MEYAKINKAN FRAKSI-FRAKSI DI PARLEMEN .....	85
A. Parlemen RIS .....	85
B. Strategi Natsir dalam Meyakinkan Setiap Fraksi .....	90
C. Tanggapan dari Setiap Fraksi .....	97
BAB IV KESIMPULAN .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	165

## DAFTAR ISTILAH

- AFNEI : Lembaga pasukan sekutu yang ditugaskan ke Indonesia pasca Perang Dunia II.
- Agresi Militer Belanda II : Serangan militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada tanggal 19-20 Desember 1948.
- Aksi Polisionil : Sebutan Aksi militer yang diberikan oleh Belanda saat Belanda menyerang Indonesia pada bulan Juli-Agustus 1947 dan Desember 1948.
- AMS : Singkatan pendidikan menengah umum di Hindia Belanda pada zaman kolonial Belanda.
- Arbitrase : Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
- Begripverwarring : Memahami kebingungan.
- Blokade : Suatu tindakan perang di mana salah satu pihak memblokir masuk atau keluar dari bagian tertentu wilayah musuh.
- Counter Proposal : Usul pengembalian yang dibuat oleh orang yang menolak usulan.

- De Facto : Sesuatu yang ada tetapi tidak diterima atau diakui secara resmi.
- Delegasi : Orang yang ditunjuk dalam suatu perundingan.
- Demonstrasi : Gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum.
- Exile Government : Pemerintahan pengasingan.
- Federal : Pemerintahan sipil yang beberapa negara bagian membentuk kesatuan dan setiap negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan di dalam negerinya.
- Federalisme : Konsep negara serikat.
- Folkways : Norma atau adat istiadat informal yang memandu perilaku sehari-hari dalam suatu masyarakat.
- Fraksi : Kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
- Gerakan Separatis : Upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memisahkan diri dari negara atau entitas politik yang lebih besar.
- Grote Oost : Timur Besar.

HIS : Singkatan untuk sekolah yang diperuntukan bagi anak keturunan bumiputra di Hindia Belanda agar dapat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar kelas satu.

Inharen : Berhubungan erat.

Jong Islamieten Bond : Organisasi perkumpulan pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda.

KNIL : Singkatan dari angkatan bersenjata milik pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada masa penjajahan.

Kolonial : Berhubungan dengan pihak yang melakukan penjajahan

Konstituante : Dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru.

Konstitusi : Seperangkat aturan yang mengatur dan mengorganisi suatu negara.

Lager Onderwijs : Ijazah setingkat SMA.

Masa Peralihan : Jangka waktu selama proses berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain.

MULO : Singkatan untuk sekolah menengah pertama yang ada di Hindia Belanda pada zaman kolonial Belanda.

Mosi Integral Natsir : Usul yang diajukan oleh Mohammad Natsir kepada parlemen RIS agar Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan pada tanggal 3 April 1950.

Negara Bagian : Suatu wilayah tingkat pertama dari suatu negara serikat.

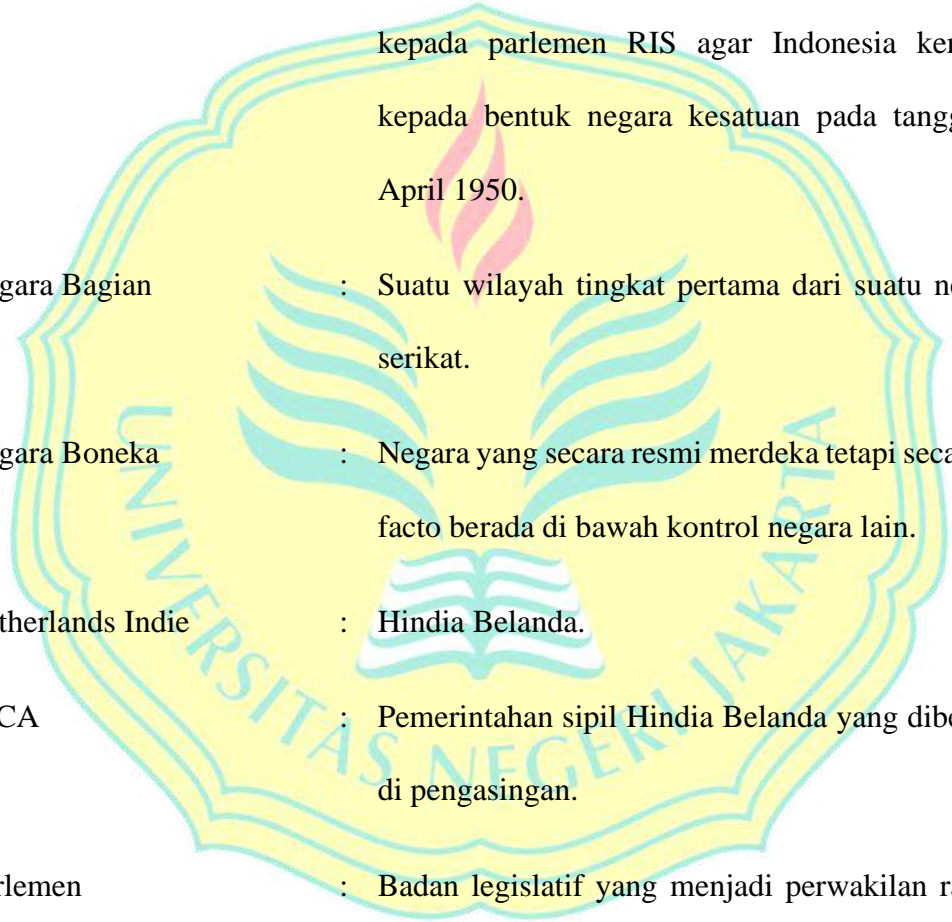
Negara Boneka : Negara yang secara resmi merdeka tetapi secara de facto berada di bawah kontrol negara lain.

Netherlands Indie : Hindia Belanda.

NICA : Pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk di pengasingan.

Parlemen : Badan legislatif yang menjadi perwakilan rakyat suatu negara.

Parlementer : Sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam mengontrol pemerintah.



Pasal : Satuan aturan dalam peraturan yang memuat suatu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Presidensial : Sistem pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Provincialisme : Paham yang mementingkan provinsi atau daerahnya sendiri.

Republik : Bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.

Resolusi : Kebulatan pendapat berupa permintaan.

Revolusi : Suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan.

RIS : Singkatan dari bentuk negara Indonesia yang berbentuk serikat akibat dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

Sekolah Rakyat : Sekolah Dasar.

Sekutu : Sekumpulan negara-negara yang berperang bersama melawan Blok Poros pada Perang Dunia II.



Senat : Majelis tinggi dari badan legislatif yang menganut sistem dua kamar.

Unitarisme : Konsep negara kesatuan.



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

## DAFTAR SINGKATAN



AFNEI	: <i>Allied Forces Netherlands East Indies</i>
AMS	: <i>Algemeene Middelbare School</i>
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BFO	: <i>Bijeenkomst voor Federale Overleg</i>
BP KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CPM	: Corps Polisi Militer
DK-PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-RIS	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
HIS	: <i>Hollandsch Inlandsche School</i> dan <i>Memantabatkan dan</i>
JIB	: <i>Jong Islamieten Bond</i> dan <i>Memantabatkan Bangsa</i>
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KMTIT	: Komisi Militer Teritorial Indonesia Timur

KNIL : *Koninklijk Nederlandsche-Indies Leger*

KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat

KTN : Komisi Tiga Negara

LO : *Lager Onderwijs*

Mayjend : Mayor Jenderal

MIAI : Majelis Islam A'la Indonesia

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

MULO : *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*

Murba : Musyawarah Rakyat Banyak

Natipij : *Nationale Indoneisische Padvinderij*

NICA : *Netherlands Indies Civil Administration*

NIT : Negara Indonesia Timur

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

NST : Negara Sumatra Timur

Parki : Partai Kebangsaan Indonesia

Parkindo : Partai Kristen Indonesia

PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa

PDRI : Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Pendis : Pendidikan Islam

Persis : Persatuan Islam

PII : Partai Islam Indonesia

PIR : Persatuan Indonesia Raya

PKI : Partai Komunis Indonesia

PKRI : Partai Katolik Republik Indonesia

PNI : Partai Nasional Indonesia

PRRI : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

PSI : Partai Sarekat Islam

PSI : Partai Sosialis Indonesia

PSII : Partai Sarekat Islam Indonesia

RHS : *Recht High Scholen*

RI : Republik Indonesia

RIS : Republik Indonesia Serikat

RMS : Republik Maluku Selatan

UNCI : *United Nations Commite for Indonesia*

UU RIS : Undang-Undang Republik Indonesia Serikat

UUD RIS : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat

UUD : Undang-Undang Dasar

UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

## DAFTAR TABEL

Table 1 : Jadwal Penelitian .....19



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pidato Ratu Wilhelmina 7 Desember 1942 .....	121
Lampiran 2	: Peta Dan Penjelasan Terbentuknya Negara-Negara Bagian RIS 125	
Lampiran 3	: Resolusi Dari Organisasi Masyarakat (Sarekat Guru Indonesia) Menuntut Pembubaran Distrik Federal Jakarta .....	127
Lampiran 4	: Resolusi Dari Organisasi Masyarakat (PPI) Menuntut Pembentukan Negara Kesatuan RI .....	128
Lampiran 5	: Resolusi Masyarakat Bali Menuntut Segera Tercapainya Negara Kesatuan .....	129
Lampiran 6	: Resolusi Masyarakat Jawa Tengah Agar Segera di Gabungkan Negara-Negara Bagian Yang Ada Ke Dalam Republik Indonesia .....	130
Lampiran 7	: Resolusi Rakyat Sukabumi Timur Mengenai Penggabungan Daerah Sukabumi Menjadi Bagian Dari Republik Indonesia..	131
Lampiran 8	: Pidato Mohammad Natsir Tentang Pembentukan Negara Kesatuan (Mosi Integral Natsir) .....	132
Lampiran 9	: Pandangan Beberapa Fraksi Mengenai Pembentukan Negara Kesatuan Dan UUDS Negara Kesatuan .....	137
Lampiran 10	: Pandangan Beberapa Fraksi Di Parlemen Mengenai Pembentukan Negara Kesatuan .....	138
Lampiran 11	: Tanggapan Partai Masyumi Mengenai Pembentukan Negara Kesatuan .....	139
Lampiran 12	: Pernyataan Sutan Sjahrir Mengenai Bagaimana Seharusnya Fokus Pemerintah Terhadap Negara Kesatuan Yang Akan Terbentuk.....	140
Lampiran 13	: Pandangan Fraksi Parkindo Mengenai Pembentukan Negara Kesatuan .....	141
Lampiran 14	: Pernyataan Presiden Sukarno Meminta Selekasnya Negara Kesatuan Terbentuk .....	142

Lampiran 15	: Pandangan Partai Murba Terhadap Negara Kesatuan Yang Akan Terbentuk.....	143
Lampiran 16	: Pandangan Fraksi-Fraksi Di Parlemen RIS Mengenai UUDS Negara Kesatuan.....	144
Lampiran 17	: Kekhawatiran Sukarni Terhadap Nasib Negara Kesatuan Jika Negara Kesatuan Yang Akan Terbentuk Tidak Sesuai Dengan Republik Indonesia Berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.....	145
Lampiran 18	: Pandangan PKI Mengenai Negara Kesatuan.....	146
Lampiran 19	: Pemandangan Beberapa Fraksi Parlemen RIS Terhadap Pembentukan Negara Kesatuan.....	147
Lampiran 20	: Pernyataan Pembentukan Negara Kesatuan RI.....	148
Lampiran 21	: Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	149
Lampiran 22	: Wawancara Dengan Ustadz Amlir Syaifa Yasin (Asisten Mohammad Natsir Dan Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).....	150
Lampiran 23	: Transkrip Wawancara Skripsi.....	151
Lampiran 24	: Wawancara Dengan Buya Zulfi Syukur (Juru Tulis Mohammad Natsir).....	157
Lampiran 25	: Transkrip Wawancara Skripsi.....	158

*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*